

PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD), PENGENDALIAN INTERN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Khairunnas³

³Fakultas Ekonomi , Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: naskhairun334@gmail.com

Teguh Erawati¹

¹Fakultas Ekonomi , Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: Teguherawat@gmail.com

Anita Primastwi²

² Fakultas Ekonomi , Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: anita.primas@ustjogja.ac.id

Abstract

This study aims to examine whether the local financial management information system, internal control, human resource competence and good governance on the quality of regional financial reports at OPD Bima City. This research method uses descriptive qualitative and primary methods using questionnaires. The study took a sample of 60 employees in the Bima City OPD. The data collection technique used purposive sampling technique. Data collection was carried out by distributing questionnaires in the form of a google form questionnaire which was distributed to Bima City OPD employees. The number of questionnaires that were processed were 60 questionnaires. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the regional financial management information system (sipkd), internal control and human resource competence have a negative effect on the quality of regional financial reports. Meanwhile, good governance has a positive effect on the quality of regional financial reports in the City of Bima.

Keywords: *Regional Financial Management Information System, Internal Control, Human Resource Competence, Good Governance, and Quality of Regional Financial Reports.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kota Bima. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan primer dengan menggunakan kuisioner. Penelitian mengambil sampel 60 pegawai yang ada di OPD Kota Bima. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuisioner dalam bentuk angket *google form* yang disebar kepada pegawai OPD Kota Bima. Jumlah kuisioner yang diolah sebanyak 60 kuisioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (sipkd) , pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Bima.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Governance*, dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini memasuki era reformasi dimana sektor publik yang berkembang dengan sangat cepat, dimana akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh kebijakan otonomi daerah. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya (Nurillah, 2014 dalam Ardianti, 2018).

Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah secara langsung akan diserahkan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah daerah otonom. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat, maka dengan demikian diperlukan program atau sistem yang mampu untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik. Karena melalui hal-hal tersebut maka akan menyebabkan munculnya sebuah sistem akuntabel yang terpercaya sehingga laporan atas pengelolaan keuangan daerah bersifat transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (Hasanah, dkk. 2019).

Pemangku kepentingan memerlukan informasi-informasi yang

bermanfaat dan memiliki nilai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005 dalam Afifah, 2019). Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan. Kondisi ini semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintahan. Demi terciptannya hal tersebut pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik (Superdi, 2017 dalam Putri, 2018).

Wujud dari pertanggungjawaban tersebut dengan upaya yang dapat dilakukan adalah menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. laporan keuangan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik, selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan dan evaluasi kinerja pemerintahan (Afifah, 2019).

Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP Berbasis Akrua dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas menuju Akrua (*Cash Toward accrual Basis*) menjadi penerapan SAP Berbasis

Akrual. Yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual adalah pengakuan, pendapatan, beban dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual (Ishartanta, 2019).

Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah standar akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual adalah sebagai berikut: (1) pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, (2) beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, (3) aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah, (4) kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan menjadi media bagi sebuah entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik yang menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran selama satu periode tertentu. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 terdapat empat kelompok utama yaitu wakil rakyat, lembaga pemeriksa,

lembaga pengawas, masyarakat dan pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyajikan dan melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bermanfaat dan sesuai bagi kebutuhan pemakainya sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-undang nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan yang disajikan itu berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Lasoma, 2012 dalam Hasanah, dkk (2019), untuk mewujudkan akuntabilitas setiap kepala daerah maupun yang memiliki kewenangan dalam tata kelola keuangan daerah wajib untuk menyertakan pernyataan pertanggung jawaban terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh sebuah daerah, dimana laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap tahunnya, Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) akan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan yang kewenangan pemeriksaan laporan keuangan daerah maupun pusat diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian BPK akan mengeluarkan sebuah opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa. BPK dapat memberikan lima macam jenis opini yaitu Wajar

Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Tidak Wajar (TP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Pernyataan Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (*Disclaimer*). Badan Pemeriksaan Keuangan, 2018 dalam Aulia, dkk (2019) menjelaskan hasil temuan atas 542 (100%) LKPD tahun 2017 mengungkapkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 411 (76%) LKPD, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 113 (21%) LKPD, dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 18 (3%) LKPD. Pada kenyataannya dari seluruh LKPD, yang belum mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu masih terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Oleheta Waruwu (2019), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau yang disingkat dengan LKPD merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan laporan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. LKPD di susun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas supaya bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain bahwa informasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Informasi laporan keuangan merupakan unsur penting bagi investor, kreditur dan pelaku bisnis lainnya. Informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna laporan keuangan apabila informasi tersebut relevan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Informasi yang

tersaji dalam laporan keuangan pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran keadaan masa lalu. Umumnya laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Suryani, 2018).

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan adalah topik yang menarik untuk pengkajian lebih lanjut. Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah ternyata masih menyajikan data yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Pada saat pelaksanaan audit, BPK masih menemukan berbagai penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah. Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya fenomena tersebut di Indonesia adalah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia (Putri, 2018).

Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu kota yang pada akhirnya akan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru dan membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Terkait dengan akuntabilitas dan transparansi melalui opini laporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bima yang sedang melaksanakan pemantapan kinerja pemerintah daerahnya melalui peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah juga berkepentingan dengan opini BPK terhadap kualitas laporan keuangannya.

Berdasarkan akun resmi dari Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kota

Bima kembali meraih WTP untuk kelima kalinya. Pemerintah kembali meraih Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018. Penilaian WTP ini merupakan kali kelima dan menjadi kado tahun pertama pada kepemimpinan Walikota H. Muhammad Lutfi S.E dan Feri Sofiyani S.H. Walikota Bima Lutfi S.E dan ketua DPRD Kota Bima Syamsurih S.H menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dari Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA pada senin 27 Mei 2019 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB. (<https://portal.bimakota.go.id>).

Fitri & Papilaya, 2016 dalam Prabowo (2019), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan mempunyai kriteria diantaranya yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas dalam berbagai bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Darmayani, 2014 dalam Prabowo, 2019).

Pengendalian intern merupakan susunan dalam pencapaian tujuan dalam hal-hal seperti (1) keandalan laporan keuangan, (2) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengertian Kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 pasal 1 dalam Ishartanta (2019) adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jawabannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah tersebut, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Ardianti, 2018).

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan struktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan relevan apabila bermanfaat bagi para pemakainya jika laporan keuangan tersebut mempunyai informasi yang berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya memiliki kriteria tersendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

2.2 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Prabowo (2019), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah proses penyajian informasi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan

daerah yang dihasilkan daerah dalam pelaporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Widayanti (2019), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (sipkd) adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.

2.3 Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas.

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Menurut Abdul, 2010 dalam Ningrum (2019) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal

pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

2.5 Good governance

Nasution (2016) menyatakan *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu berupa sistem yang mengatur dan mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata kelola pemerintah yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau subjek penelitian melalui penyebaran angket. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa data yang berasal dari penyebaran angket kepada responden. Menurut Sugiyono (2015) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada fenomena atau gejala untuk meneliti suatu populasi dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu dengan analisis data bersifat statistik.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui survey kuisisioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bima yang berada dilingkungan dinas. Metode pengumpulan data akan dilakukan melalui tiga metode, yaitu:

1. Angket atau Kuisisioner
2. *Library Research*
3. *Internet Research*

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dilakukan menggunakan *SPSS Versi 20.0*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk menentukan pengaruh SIPKD, Pengendalian Intern, Kmpetensi SDM dan *Good governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada OPD Kota Bima.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Uji Validitas

Hasil uji validitas yang digunakan adalah menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya. Pengujian ini menggunakan metode analisis Corrected item-total correlation, dimana suatu instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi r-hitung > koefisien korelasi r-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05.

b. Uji Realibilitas

Hasil uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas data dapat dilakukan dengan metode *Cronbach's alpha* dimana suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien keandalan realibilitas sebesar 0,60 atau lebih.

c. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk memenuhi persyaratan model regresi bahwa data yang diperoleh memiliki sifat normal. Untuk dilakukan

ujian sampel *Kolmogorof Smornov* dengan bantuan *software* SPSS 20.0.

**Hasil Uji Normalitas 1-Sample K-S
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.84892765
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.539
Asymp. Sig. (2-tailed)		.933
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Hasil pengujian pada tabel tersebut terlihat besarnya nilai *kolmogorof-smirnov Z* adalah 0.539 dengan nilai signifikan (*Asymp.sig.* (2.tailed) sebesar 0.933 dan nilainya jauh diatas $\alpha=0,05$. Dalam hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

1) Uji multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk membuktikan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel bebas dalam suatu penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolineritas digunakan Variance Inflation Faktor (VIF). Data dalam penelitian ini dinyatakan bebas multikolineritas apabila tolerance >0,1 dan VIF <10.

**Hasil Uji Multikolineritas
 Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics ToleranceVIF
	SIPKD	.3362.974
1	Pengendalian intern	.1407.134
	Kompetensi SDM	.1178.528
	<i>Good governance</i>	.2883.476

Dari sampel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai VIF berada sekitar 1 sampai 10, demikian juga hasil dari *tolerance value* lebih dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas antar variabel independen.

2) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan lain (Ghozali, 2005). Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menguji glejser dengan

probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan $\alpha=5\%$ atau 0.05.

**Hasil uji heteroskedistisitas
 Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.585	1.264		2.046	.046
	SIPKD	.018	.035	.117	.515	.609
	Pengendalian intern	-.055	.051	-.378	-1.071	.289
	Kompetensi SDM	.028	.071	.156	.403	.688
	Good governance	-.010	.061	-.039	-.157	.876

Hasil pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan masing-masing variabel > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Analisis Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian bertujuan untuk membuktikan pengaruh SIPKD, Pengendalian Intern, Kompetensi SDM dan Good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.654	1.956		3.913	.000
	X1	-.002	.054	-.003	-.030	.976
	X2	.050	.079	.106	.631	.530
	X3	.209	.109	.351	1.914	.061
X	X4	.384	.094	.478	4.079	.000

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 7.654 - 0,002 X_1 + 0,050 X_2 + 0,209 X_3 + 0,384 X_4 + e$$

simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

**Hasil Uji F
 ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	727.957	4	181.989	49.627	.000 ^b
	Residual	201.693	55	3.667		
	Total	929.650	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

Secara simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2) adalah ukuran statistik yang mengukur derajat hubungan antara variabel X dan Y, digunakan untuk mengetahui presentase besarnya variabel tergantung yang disebabkan oleh perubahan variabel bebas.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.767	1.91498
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan pada tabel R 0,885 artinya besarnya pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), pengendalian intern, kompetensi SDM dan *good governanc* terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,885. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen karena nilai R mendekati satu selanjutnya.

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau signifikansi 5% ($\alpha=0,05$). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima demikian juga sebaliknya. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

3) Uji T

Hasil Uji Statistik (T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.654	1.956		3.913	.000
	X1	-.002	.054	-.003	-.030	.976
	X2	.050	.079	.106	.631	.530
	X3	.209	.109	.351	1.914	.061
	X4	.384	.094	.478	4.079	.000

Berdasarkan hasil nilai tabel diatas, dapat disimpulkan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

1. Variabel SIPKD memiliki tingkat signifikan sebesar 0,976 dan t-tabel 1,671. Karena tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,976 > 0,05$) dan t-hitung -0,030. Hal ini menunjukkan bahwa SIPKD berpengaruh negatif

terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama (H1) tidak dapat didukung kebenarannya.

2. Variabel pengendalian intern memiliki tingkat signifikan sebesar 0,530 dan t-tabel sebesar 1,671. Karena tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,530 > 0,05$) dan t-hitung 0,631. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hipotesis (H2) tidak dapat didukung kebenarannya.
3. Variabel kompetensi SDM memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,061 dan t-tabel sebesar 1,671. Karena tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($1,671 > 0,05$) dan t-hitung 1,914. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hipotesis (H3) tidak dapat didukung kebenarannya.
4. Variabel *good governance* memiliki tingkat signifikansi 0,000 dan t-tabel sebesar 1,671. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t-hitung 4,079. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hipotesis (H4) didukung kebenarannya.

4.2 Pembahasan

Hasil hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa pengaruh sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan tidak didukung. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel SIPKD dengan signifikansi 0,976. Nilai signifikansi 0,976 lebih besar dari (α) 0,05 sehingga hipotesis SIPKD tidak berpengaruh dan tidak didukung kebenarannya.

Hasil hipotesis kedua (H2) membuktikan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Bima tidak didukung, Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern dengan signifikansi 0,530. Nilai signifikansi 0,530 lebih besar dari (α) 0,05 sehingga hipotesis pengendalian intern tidak berpengaruh dan tidak didukung kebenarannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Philadelphia (2020), yang mengatakan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan tidak didukung. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dengan signifikansi 0,061. Nilai signifikansi 0,061 lebih besar dari (α) 0,05 sehingga hipotesis kompetensi SDM tidak berpengaruh sehingga tidak didukung kebenarannya.

Hasil hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan didukung. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel *good governance* dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari

(α) 0,05 sehingga hipotesis *Good governance* berpengaruh sehingga terdukung kebenarannya. Jadi secara parsial *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kota Bima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *good governance* akan menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang semakin baik pula.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut:

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama (H1) tidak dapat didukung kebenarannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utama (2021), menunjukkan penerapan SIPKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini disebabkan oleh teknologi yang belum dimanfaatkan secara optimal, kurangnya OPD yang memiliki tenaga operator SIPKD yang mampu dan handal dalam mengaplikasikan sistem itu sendiri.

Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hipotesis (H2) tidak dapat didukung kebenarannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Philadelphina (2020), yang mengatakan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan di Kota Bima belum didukung pengendalian yang memadai,

diantaranya kebijakan akuntansi yang ditetapkan belum dijalankan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hipotesis (H3) tidak dapat didukung kebenarannya. ini menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia pada bagian pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima belum mencukupi dan belum memenuhi peraturan penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishartanta (2018) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sub-bagian pengelolaan keuangan tidak memiliki sumberdaya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas.

Good governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hipotesis (H4) didukung kebenarannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2016) yang mengatakan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *good governance* akan menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang semakin baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memperbesar jumlah sampel yang terlibat didalam pengelolaan keuangan daerah dan melengkapi metode survey dengan melakukan wawancara supaya meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan.
2. Didalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu responden yang mengisi kuisisioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya sehingga data yang diperoleh belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka untuk peneliti selanjutnya lebih bisa mengembangkan item pertanyaan kuisisioner kepada responden dengan pernyataan yang memiliki tingkat validitas dan realibilitas lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- yani. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Pulau Sambu Kuala Enok. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1–18. Retrieved from <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/JAK/article/view/459>
- Rinaldi, R. R. (2016). Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–12.
- Afifah. (2019). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi sumber daya manusia dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo). *Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Aryani, N. K. D., & Muliati, N. K. (2020). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Oktober 2020. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.
- Widari, L., & Sutrisno. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5(10), 117–126.
- Anggreni, N. M. M., & Asri Dwija Putri, I. G. A. M. (2018). Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 2018(1), 352–380. <http://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p14>
- Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 19–26. <http://doi.org/10.35906/je001.v8i1.330>
- Made, A. D., & Nyoman, Trisna Herawati Anantawikrama, T. atmaja. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd), Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng, 2.
- Putra, K. B. (2019). Pengaruh Keahlian(Skills) Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pt. Askrida Sumatera Utara).

Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

- Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 434. <http://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p17>
- Maryani Novita, 2016. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. *Penelitian tidak dipublikasikan*
- Ardianti, E. P. (2018). Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(2), 54–69.
- Rasinta, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, (2009), 1–60.
- Mia, O., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Journal of Accounting Of Accounting*, 2(2), 2.
- Putri, A. U., & Djuita, P. (2021). Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kelurahan Sukajaya Kota Palembang. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 226–232
- Aldino, O., Nasution, A., & Utara, U. S. (2015). PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP PEGAWAI KANTOR UNIT PELAYANAN TERPADU VI DINAS, 506–512.
- Hasanah, Y. ., Sasongko, N., & Bawono, A. D. . (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi ,Penerapan Sistem, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinatah Daerah (Studi pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). *University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Purworejo*.
- Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari.(2014). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi.*Syariah Paper Accounting FEB-UMS*, 401–444.
- Waruwu, O. (2019). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Nias Barat, *lim* (2009), 1–25.
- Mardiana, R., & Fahlevi, H. (2017).Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Efektivitas Penerapan Sap Berbasis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 30–38.
- Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan

- Keuangan. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Setiawan, I. W. N. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 671-700.
- Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, TI, dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 3475-3500.
- Ayu, I., Kiranayanti, E., Made, N., & Erawati, A. (2016). PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
- Tinggi, S., Ekonomi, I., & Wiwaha, W. (2019). *IE Ja W ng id an ya P Wi la w gi a at ha Ja W ng id an ya P Wi la w gi a at ha*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Istiqomah Shinta Philadhelhia, dkk (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPN Veteran Yogyakarta.
- Nadia Azizah Prabowo. 2019. Skripsi. Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Klaten).
- Suli Maryani, 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada OPD Kota Yogyakarta). Skripsi Akuntansi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Referensi Lain

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro
- Peraturan Pemerintah, 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP nomor 60 Tahun 2008.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.